

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Bisnis Indonesia

Wilayah Berita : Provinsi Jawa Tengah

Halaman 1 dan 7

Jateng Fokus Pemberdayaan Ekonomi

Pemerintah mempercepat pencairan dana desa pada tahun 2018. Jika sebelumnya dana desa dicairkan dalam dua tahap yaitu

60 persen pada April dan 40 persen pada Agustus, pada tahun ini, 20 persen dari dana tersebut dicairkan pada Januari 2018.

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, percepatan pencairan dana desa ini dilakukan agar program *cash for work* yang dimulai pada 2018 bisa segera berjalan. "Presiden minta supaya *cash for work* bisa berjalan secepatnya. Selama ini mekanismenya 60 persen langsung dibayar melalui APBD pada April. Sekarang kita bagi Januari yang 20 persen, 40 persen tetap April, dan

sisanya (40 persen lagi) tetap di Agustus," ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/1/2018). Menurut Sri Mulyani, dengan percepatan penyaluran dana desa di Januari 2018, maka tidak ada alasan bagi daerah yang biasanya tidak memiliki aktivitas bersifat padat karya di awal tahun karena anggarannya belum turun. Dari dana sebesar Rp 60 triliun yang diang-

garkan pada tahun ini, sebesar 20 persen atau sekitar Rp 12 triliun telah disalurkan Januari ini. Tahun ini, desa di Jawa Tengah menerima kucuran dana desa sejumlah Rp 6,74 triliun. Dana sejumlah itu akan dibagi ke sebanyak 7.809 desa. Sehingga, tiap-tiap desa akan menerima sekitar Rp 863 juta.

(Bersambung hlm 7 kol 1)

Jateng...

(Sambungan hlm 1)

Dana desa yang diterima Jawa Tengah tersebut lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Jika dibandingkan semenjak kali pertama program dana desa digulirkan tahun 2015, kenaikan sudah mencapai Rp 4,5 triliun. Pada 2015 sebesar Rp 2,2 triliun, naik menjadi Rp 5 triliun pada 2016, dan tahun 2017 sebesar Rp 6,3 triliun.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Permasdes Dukcapil) Pemrov Jateng Sudaryanto mengatakan alokasi dana desa tahun ini jika dibagi rata 7.809 desa di Jateng maka per desanya memperoleh sekitar Rp 857 juta. Lebih besar dari tahun 2017 yang rata-ratanya Rp 806 juta/desa.

Pada tahun 2017, lanjutnya, hampir 95% dari anggaran Rp 6,3 triliun digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa. Sisanya dimanfaatkan untuk

pemberdayaan masyarakat. Setelah tiga tahun anggaran lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik, Sudaryanto meminta tahun ini anggaran untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat ditingkatkan.

"Atau setidaknya *fifty-fifty* lah dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, jadi seimbang. Karena selama ini selalu fisik, sampai jalan ke kuburan saja dibangun bagus," kata Sudaryanto, Minggu (7/1).

Perbaikan Perekonomian

Pembangunan fisik dinilai penting, namun pemberdayaan ekonomi masyarakat tak kalah penting. Pemberdayaan itulah yang bisa jadi pemacu peningkatan ekonomi masyarakat.

Pelatihan bisnis UMKM salah satunya yang bisa menjadi daya angkat perbaikan perekonomian. Dengan pelatihan, pelaku UMKM akan mengetahui seperti manajemen keuangan usaha, teknik penjualan,

memperluas jaringan hingga persoalan peningkatan kualitas produksi.

Pemberdayaan masyarakat diharapkan juga disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa. Ia mencontohkan pengelolaan potensi sumber air yang ada di Desa Pongkok Kabupaten Klanten. Desa yang berada di Kecamatan Polanharjo ini kini menjadi salah satu desa terkaya di Indonesia.

Pendapatan asli daerahnya (PAD) naik 300 kali lipat dibanding sebelum mengelola sumber air secara profesional, yakni menjadi Rp 4,2 miliar per tahun. Maka, desa harus mengenali lebih dulu potensi apa yang dimiliki dan selanjutnya membuat program.

Sudaryanto menjelaskan anggaran dana desa ditransfer langsung dari APBN melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kementerian ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kabupaten dan barulah ditransfer ke desa. Anggaran tidak melalui APBD Provinsi. Demikian halnya dengan laporan

antanggungjawaban yang langsung ke kementerian tanpa melalui pemerintah provinsi. Namun untuk pengawasan dan pembinaan, provinsi diwajibkan turut melakukannya.

Petunjuk teknis (Juknis) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal itu nanti juga menjelaskan penggunaan anggaran yang dilakukan secara swakelola sebagaimana yang dijelaskan oleh kementerian dalam berbagai kesempatan.

Menurutnya, penggunaan anggaran secara swakelola akan memberikan dampak positif yang besar pada masyarakat desa. Artinya, setiap pembangunan diutamakan melibatkan warga setempat. Mulai dari konsep hingga tukang-tukang bangunannya. Namun yang menjadi catatan tak semua pembangunan bisa melibatkan tukang-tukang biasa. Ia mencontohkan, pembangunan jembatan dengan panjang dan lebar tertentu. Maka harus dikerjakan oleh ahli dan penggarapannya pun tak boleh asal-asalan. Alat yang digunakan juga harus sesuai

standar.

"Sampai saat ini masih menunggu Juknisnya. Petunjuk teknis tersebut yang akan mengatur mana pekerjaan yang dilakukan secara swakelola ataukah masih dilakukan lelang," jelasnya.

Sementara itu berdasarkan data Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng tahun 2017 setidaknya mencatat ada 25 kepala desa maupun perangkatnya yang diduga melakukan penyalahgunaan dana desa tahun 2017. Dari jumlah itu, 14 di antaranya berada di Purworejo dan 11 lainnya tersebar di sejumlah kabupaten di Jateng salah satunya di Batang.

Dari 14 temuan di Purworejo, lanjutnya, penyelewengan terbanyak dilakukan berupa pembangunan yang tidak sesuai spek, ada dana yang ditilap kades, mark up anggaran, mark up jumlah barang, dan belanja fiktif.

Penyalahgunaan ini dilakukan lantaran ada celah aturan yang dimanfaatkan sebagian kades yang nakal. (**Hanung Soekendo-23**)